

STRATEGI REKONSILIASI SOSIAL DAN DAMPAK POLARISASI POLITIK DI DESA JATILENGGER PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ridwan Agus Saputra¹, Meidi Saputra².

¹²Universitas Negeri Malang.

e-mail: ridwan.agus.2107116@students.um.ac.id¹, meidi.saputra.fis@um.ac.id².

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4749>

Received: 30 Juli 2025

Revised: 22 September
2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger serta dampaknya terhadap kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga dari kedua kubu pendukung calon kepala desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berbagai kegiatan sosial pasca Pilkades. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penelusuran pola-pola sosial. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung untuk menjaga validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi berlangsung secara informal melalui peran aktif tokoh masyarakat dan penggunaan strategi berbasis nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, kerja bakti, pengajian, serta kegiatan peringatan hari kemerdekaan. Meskipun masih terdapat tantangan berupa luka emosional dan sisa fanatisme politik, rekonsiliasi ini terbukti mampu memulihkan hubungan sosial warga dan memperkuat kembali kohesi sosial desa. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan sosial budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial di tingkat desa.

Kata Kunci: rekonsiliasi, Pilkades, kohesi_sosial, nilai_lokal

Abstract

This study aims to examine the process of reconciliation following the village head election in Jatilengger Village and its impact on the community's social cohesion. The research adopts a descriptive qualitative approach. Data sources were obtained from community leaders, village officials, and residents from both sides of the competing village head candidates. Data collection techniques included direct field observation, in-depth interviews, and documentation of various social activities conducted after the election. Data analysis employed the interactive model developed by Miles and Huberman, consisting of three key components: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Data reduction was carried out by selecting and simplifying essential information from interviews and observations. The data were then presented in descriptive narrative form to reveal recurring social patterns. Conclusion drawing

was conducted continuously throughout the research process to ensure the validity and consistency of the findings. The results indicate that the reconciliation process occurred informally through the active involvement of local leaders and the implementation of strategies rooted in local values, such as community discussions, collective work, religious gatherings, and Independence Day celebrations. Although emotional wounds and traces of political fanaticism remained, the reconciliation efforts effectively restored social relationships and strengthened the village's social cohesion. These findings highlight the significant role of local socio-cultural values in maintaining democratic sustainability at the village level.

Keywords: Reconciliation, village_election, social_cohesion, local_values

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum. Sistem ini tidak hanya memberikan hak untuk memilih, tetapi juga memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan setara (Cornelia et al., 2024). Konsep ini berkembang dari pemikiran bahwa kesetaraan politik, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia adalah elemen fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan representatif.

Dalam negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka (Kirana et al., 2024). Di Indonesia, demokrasi telah diimplementasikan dalam berbagai pemilihan tingkatan umum, mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan paling bawah yaitu pemilihan kepala desa. Dari pelaksanaan tingkatan pemilu tersebut melahirkan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal (Putri et al., 2023). Demokrasi tidak hanya menjadi landasan bagi pemilihan umum, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, menjamin keterwakilan, serta mengarahkan arah pembangunan negara, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi tahun 1998 yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya era keterbukaan politik (Ramadhan, 2022). Dalam konteks ini, pemilihan umum menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin pilihan mereka, sebab pemilu tidak hanya sebagai simbol demokrasi, tetapi juga sebagai wadah ekspresi politik masyarakat (Kirana et al., 2024). Perkembangan demokrasi ini juga memengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), yang menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang nyata di tingkat lokal dan mencerminkan dinamika serta aspirasi masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia telah dijamin dalam UUD NRI 1945 melalui pasal 18 B dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana dua hal ini merupakan payung hukum sekaligus regulasi untuk komitmen menjalankan demokrasi hingga ketingkat desa (Rahadiyanti, 2022). Dengan menerapkan prinsip demokrasi langsung, pelaksanaan pilkades memungkinkan masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam menentukan pemimpin pilihan mereka. Namun kondisi yang berbeda sering kali memunculkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pilkades dapat meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

desa (Hutajulu et al., 2024), akan tetapi, di sisi lain pelaksanaan pilkades juga sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, konflik antar calon, serta polarisasi di antara warga desa yang dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu stabilitas komunitas (Hidayatullah & Pitono, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pilkades tidak selalu bersifat positif, namun juga dinamika negatif memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat desa.

Berbagai survei menunjukkan bahwa setelah pilkades, muncul dinamika yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik di tingkat desa, hal ini dibuktikan dengan hasil survey Badan Pusat Statistik yang mendeskripsikan tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik local pasca pilkades (Oktapiani et al., 2024). Sementara dalam survei lain mengungkapkan bahwa pasca pilkades sering muncul konflik antar pendukung calon (Taufiq, 2025) dan banyak desa mengalami peningkatan ketegangan sosial, terutama akibat persaingan politik yang intens yang mengakibatkan perpecahan di komunitas desa (TrindaSari, 2025). Meskipun pilkades dapat meningkatkan keterlibatan politik masyarakat, tantangan seperti konflik dan ketegangan sosial tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di tingkat desa.

Salah satu desa yang mengalami dampak dari dinamika ini adalah Desa Jatilengger. Desa ini mengalami dinamika pasca pilkades dimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lokal meningkat, tetapi juga muncul konflik antar pendukung calon yang menyebabkan ketegangan sosial dan perpecahan dalam masyarakat yang berlarut-larut. Ketegangan sosial ini dapat berdampak buruk terhadap kohesi sosial masyarakat, yang tadinya masyarakat tenteram dan damai menjadi masyarakat yang berkonflik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pilkades di berbagai daerah di Indonesia sering kali memunculkan konflik horizontal antarwarga desa. Hal ini dibuktikan dengan munculnya perpecahan di antara kelompok pendukung karena rivalitas politik yang kental (Annasta Surya, 2024). Sementara dalam penelitian lain, disebutkan bahwa konflik pasca pilkades menimbulkan hambatan pembangunan desa akibat adanya friksi antara elit desa dengan masyarakat dan dampak Pilkades timbul masyarakat-masyarakat yang tidak mampu menerima hasil pemilu secara lapang dada (Utami, 2023). Dalam situasi seperti ini diperlukan upaya yang dapat dilakukan masyarakat desa sehingga tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat apalagi menghambat pembangunan, oleh karena itu rekonsiliasi pasca pilkades adalah sebuah keniscayaan.

Rekonsiliasi adalah upaya memulihkan hubungan sosial yang retak akibat persaingan politik selama masa pemilihan (Indrawan et al., 2022). Rekonsiliasi bertujuan untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpecah, menciptakan suasana dialog yang konstruktif, dan mengurangi ketegangan yang muncul setelah pilkades (Annasta Surya, 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dijelaskan bahwa setelah dilakukannya rekonsiliasi, lebih dari 75% desa yang sebelumnya mengalami ketegangan politik menunjukkan tanda-tanda normalisasi kembali dalam hubungan sosial dan komunikasi antarwarga (Wasi, 2024). Melihat penjelasan ini, setiap desa-desa yang mengalami dinamika pasca pilkades terutama yang melahirkan konflik di wilayahnya diperlukan rekonsiliasi, tidak terkecuali di desa Jatilengger.

Secara keseluruhan, berbagai dinamika yang muncul pasca Pilkades dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Pilkades sebagai manifestasi dari demokrasi lokal, mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, namun juga

memunculkan tantangan seperti konflik antar pendukung calon yang dapat merusak kohesi sosial. Fenomena ini tercermin dalam berbagai survei dan penelitian yang mengungkapkan peningkatan ketegangan sosial dan hambatan pembangunan akibat perpecahan di antara warga desa.

Penelitian ini berfokus pada dinamika rekonsiliasi dan dampak politik Pilkades terhadap kondisi *guyub* masyarakat sehingga menjadi profil desa yang kokoh. Desa ini dipilih karena dalam pra observasi yang dilakukan oleh peneliti, desa mengalami dinamika rekonsiliasi pasca Pilkades sehingga melakukan rekonsiliasi pasca pilkades. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan proses rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger sebagai studi kasus untuk menggali dinamika sosial-politik secara lebih mendalam, yang hingga saat ini masih jarang diteliti secara spesifik pada konteks desa pasca konflik Pilkades. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan proses rekonsiliasi dengan penguatan kembali kohesi sosial masyarakat pasca polarisasi politik lokal. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan fokus baru yaitu dinamika rekonsiliasi dan dampak politik di Desa Jatilengger untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kohesi sosial pada konteks yang berbeda.

Desa Jatilengger menjadi salah satu contoh konkret di mana dampak tersebut

terlihat jelas, dengan munculnya konflik dan ketegangan yang mengharuskan adanya upaya rekonsiliasi. Desa ini merupakan desa dengan struktur sosial yang sebelumnya dikenal rukun dan *guyub*. Namun, pasca pelaksanaan Pilkades, dinamika politik lokal membawa perubahan signifikan terhadap relasi sosial warganya. Polarisasi antar pendukung calon kepala desa menimbulkan ketegangan yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kohesi sosial. Di Desa Jatilengger, polarisasi ini muncul dalam bentuk pembelahan masyarakat menjadi dua kubu utama yang saling berseberangan, di mana masing-masing kelompok mempertahankan loyalitas terhadap calon yang didukungnya. Setelah pemilihan usai, sebagian warga masih menunjukkan sikap eksklusif dan enggan berbaur dengan kelompok lain, sehingga hubungan sosial yang sebelumnya harmonis menjadi renggang. Ketegangan ini terlihat dalam menurunnya interaksi sosial, terhambatnya kegiatan bersama, dan lahirnya segregasi sosial berdasarkan afiliasi politik. Rekonsiliasi menjadi penting untuk memulihkan hubungan sosial yang terpecah akibat persaingan politik selama Pilkades. Selaras dengan pemikiran di atas, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika rekonsiliasi dan dampak politik terhadap kohesi sosial di Desa Jatilengger pasca Pilkades.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger?
- b. Bagaimana strategi rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger?
- c. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rekonsiliasi pasca

pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger?

- d. Bagaimana dampak politik rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Jatilengger
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak politik rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di desa Jatilengger

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami dinamika rekonsiliasi serta dampak politik terhadap kohesi sosial secara mendalam dalam konteks sosial masyarakat Desa Jatilengger pasca pemilihan kepala desa. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengungkap makna, persepsi, dan praktik sosial yang terbentuk dalam proses rekonsiliasi serta relasi antarwarga yang sempat mengalami polarisasi politik. Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama sangat penting dalam menggali data secara alami dan mendalam. Peneliti terlibat langsung di lapangan dengan berinteraksi bersama informan, mengamati aktivitas sosial warga, dan mencatat perubahan dinamika sosial selama masa pasca-Pilkades.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang dipilih secara purposif karena menjadi salah satu desa yang mengalami ketegangan sosial akibat hasil pemilihan kepala desa. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan kepala desa terpilih dan tidak terpilih, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga

dari berbagai latar belakang keterlibatan politik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif terhadap kegiatan masyarakat dan proses rekonsiliasi, wawancara mendalam dengan berbagai pihak, dokumentasi berupa arsip desa dan catatan kegiatan, serta studi pustaka dari referensi yang relevan.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta diperkuat dengan member check untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatilengger

Proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger berlangsung melalui dua jalur utama, yakni rekonsiliasi formal yang dilakukan melalui mekanisme administratif oleh pemerintah desa, serta rekonsiliasi informal yang berlangsung melalui pendekatan kultural dan sosial oleh masyarakat secara mandiri. Secara empiris, bentuk dari rekonsiliasi formal di Desa Jatilengger diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti rapat desa, sosialisasi kebijakan pembangunan, serta pendistribusian bantuan sosial. Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan pendekatan struktural yang bertujuan membangun kembali kepercayaan warga terhadap legitimasi pemerintahan desa pascakontestasi politik.

Pendekatan formal ini termasuk dalam dimensi institusional atau dikenal sebagai *top-down approach*, di mana struktur kekuasaan formal menjadi motor utama dalam menginisiasi dan mengarahkan proses rekonsiliasi. Pendekatan semacam ini menekankan peran signifikan aktor institusional seperti pemerintah atau otoritas lokal dalam

menciptakan stabilitas dan mengelola ketegangan sosial pascakonflik (Lubis et al., 2024). Praktik serupa juga ditemukan di Desa Wulublolong, Kabupaten Flores Timur, di mana konflik akibat pemilihan kepala desa berhasil diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah desa serta lembaga adat formal yang difasilitasi secara administratif (Onan et al., 2025).

Namun demikian, pendekatan rekonsiliasi dapat berbeda-beda tergantung pada struktur sosial dan budaya lokal. Sebagai contoh, di Desa Bontoa, Kabupaten Jeneponto, proses rekonsiliasi lebih mengandalkan kekuatan masyarakat adat sebagai fasilitator utama tanpa dominasi institusi pemerintah formal (Syarif, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model baku dalam rekonsiliasi; masing-masing komunitas merancang strategi yang kontekstual sesuai dengan nilai dan dinamika kekuasaan setempat. Dalam kerangka tersebut, salah satu aspek kunci yang memengaruhi efektivitas strategi rekonsiliasi lokal adalah penyediaan ruang dialog yang aman dan inklusif.

Konsep ruang aman atau *safe space* menjadi esensial dalam proses rekonsiliasi pascakonflik. Ruang ini memungkinkan individu maupun kelompok untuk berbagi pengalaman dan berdialog tanpa rasa takut terhadap diskriminasi, stigma, atau ancaman (Isba & Sakmaf, 2024). Akan tetapi, temuan lapangan di Desa Jatilengger menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan masih bersifat eksklusif. Kelompok pendukung calon kepala desa yang kalah mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam forum perencanaan pembangunan maupun distribusi manfaat sosial. Situasi ini mereka maknai sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang justru memperlebar jurang sosial antar kelompok. Fenomena serupa juga tercatat di Desa Banjarsari, Kabupaten Sidoarjo, di mana kelompok pendukung calon yang kalah tidak diundang dalam

forum musyawarah pascapemilihan (Khobir & Khasanah, 2020).

Sebaliknya, di Desa Jati, Kabupaten Gunungkidul, proses rekonsiliasi berjalan relatif lebih mulus. Kepala desa terpilih secara proaktif mengundang lawan politiknya untuk berdialog dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa (Silvia, 2024). Inisiatif dari pemimpin lokal semacam ini bukan hanya mencerminkan *goodwill* politik, tetapi juga menjadi kunci dalam menciptakan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Inklusivitas dalam kepemimpinan lokal terbukti menjadi elemen strategis dalam mengatasi ketegangan sosial dan membangun kembali relasi yang sempat renggang.

Di sisi lain, pendekatan kultural sebagai bagian dari rekonsiliasi juga diterapkan di Desa Jatilengger melalui model *bottom-up reconciliation*. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi yang dibangun dari bawah oleh masyarakat melalui hubungan personal dan interaksi komunitas (Tidore, 2020). Aktivitas seperti kerja bakti dan ritual adat menjadi wahana bagi warga untuk saling berinteraksi, merekatkan solidaritas, dan meredakan ketegangan pascakontestasi. Praktik serupa dapat ditemukan di Desa Kampungbaru, Kabupaten Pariaman, yang menunjukkan keberhasilan rekonsiliasi sosial melalui kegiatan adat, musyawarah, dan gotong royong (Putra et al., 2022).

Menariknya, di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, keterlibatan generasi muda menjadi kunci penting dalam proses penyembuhan sosial pascakonflik. Pemuda setempat menginisiasi forum diskusi terbuka dan olahraga bersama sebagai media untuk mengurangi polarisasi dan menumbuhkan rasa kebersamaan (Tuhuteru, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *cultural peacebuilding* yang dikemukakan oleh Avruch (1998), yang memandang budaya lokal bukan hanya sebagai warisan, melainkan juga

sebagai sumber daya sosial untuk membangun ulang hubungan yang rusak melalui praktik-praktik yang bermakna dan relevan secara kultural (Tuhuteru, 2022).

Dalam kerangka teoritis, proses rekonsiliasi di Desa Jatilengger juga dapat dibaca melalui perspektif teori kohesi sosial. Teori ini menekankan pentingnya kualitas relasi sosial dalam komunitas yang mencakup rasa keterikatan, solidaritas, dan inklusi antarkelompok (Januraga & Ked, 2024). Kohesi sosial menjadi syarat utama bagi stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan, terutama di komunitas yang mengalami disrupsi akibat konflik (Chalid, 2024). Dalam hal ini, proses rekonsiliasi yang menysasar terbentuknya kembali kohesi sosial tidak cukup hanya dengan upaya formal, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan kultural.

Namun, upaya membangun kohesi sosial tidak lepas dari tantangan, terutama ketika terdapat ketimpangan partisipasi dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kohesi sosial tidak otomatis menjadi hasil dari proses rekonsiliasi, tetapi harus diupayakan secara konsisten melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat: mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, hingga pemuda. Ketika semua pihak memiliki ruang untuk didengar dan dilibatkan, maka rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap komunitas dapat tumbuh dan menjadi dasar bagi rekonsiliasi yang berkelanjutan (Chalid, 2024).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi dan penguatan kohesi sosial sangat ditentukan oleh tiga elemen utama. Pertama, adanya komitmen dan inisiatif inklusif dari elite lokal, khususnya kepala desa terpilih. Kedua, penyediaan ruang dialog yang aman dan partisipatif yang menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok oposisi. Ketiga, penguatan

interaksi sosial berbasis nilai-nilai kultural lokal yang hidup dan relevan dengan konteks masyarakat setempat (Chalid, 2024).

Dengan demikian, rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa bukanlah sekadar proses administratif atau simbolis, melainkan bagian integral dari upaya membangun kembali tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Desa Jatilengger, dengan seluruh kompleksitasnya, menjadi cerminan bahwa rekonsiliasi dapat berjalan efektif bila dijalankan melalui pendekatan ganda formal dan kultural yang saling melengkapi dan disesuaikan dengan dinamika lokal. Proses ini tidak hanya meredakan konflik jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi terbentuknya kohesi sosial yang kokoh sebagai fondasi masa depan komunitas yang lebih harmonis.

3.2. Strategi Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatilengger

Strategi rekonsiliasi yang diterapkan di Desa Jatilengger berfokus pada pendekatan informal. Kepala desa memilih untuk memaksimalkan potensi sosial yang telah ada dalam masyarakat, seperti peran kepala dusun, bhabinkamtibmas, tokoh pemuda, dan tokoh agama dalam mengelola hubungan antarwarga. Pendekatan ini berusaha untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat dan menghindari pembentukan sekat politik baru yang dapat memperburuk polarisasi pasca Pilkades.

Pendekatan informal menjadi salah satu strategi utama dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger. Tokoh-tokoh lokal seperti kepala dusun, bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan tokoh pemuda berperan aktif sebagai mediator sosial yang dipercaya oleh warga. Mereka secara personal mendekati kelompok-kelompok yang mengalami perpecahan politik untuk membangun

komunikasi dan mengurangi ketegangan yang ada. Pendekatan ini memungkinkan rekonsiliasi berjalan secara alami dan menghindari ketergantungan penuh pada mekanisme formal pemerintah desa (Tohawi, 2025). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Desa Wringinanom, Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, memiliki peran signifikan sebagai mediator informal dalam menjaga stabilitas sosial pasca konflik lokal. Tokoh agama di desa tersebut berperan aktif dalam menjembatani kelompok-kelompok yang sempat berseteru, melalui forum pengajian dan pertemuan rutin warga yang difungsikan sebagai ruang dialog dan pemulihan sosial (Auliyah & Aziz, 2025).

Keberhasilan di Desa Sira, Kabupaten Sorong Selatan dalam proses rekonsiliasi informal sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh tokoh adat setempat. Dalam konteks ini, ketua adat memainkan peran utama dalam menyatukan kelompok yang terlibat konflik, melalui pelaksanaan ritus budaya seperti upacara bakar batu dan penyampaian noken perdamaian, yang memiliki makna simbolik tinggi dalam budaya lokal (Rohana & Ahmad, 2025).

Kedua studi kasus tersebut mencerminkan relevansi pendekatan rekonsiliasi berbasis relasional yang menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktor-aktor lokal yang memiliki kapasitas sosial dan legitimasi moral dalam komunitasnya. Teori ini menekankan pentingnya membangun kembali relasi sosial, rasa saling percaya, serta pemulihan emosi kolektif yang terluka akibat konflik (Hidayat, 2024). Peran tokoh masyarakat berdampak dalam proses rekonsiliasi, sebagaimana terlihat di dua desa tersebut, tidak dapat serta-merta dijadikan acuan tunggal dalam konteks desa lain. Variasi kondisi sosial, struktur budaya, dan pengalaman konflik yang berbeda di

tiap komunitas membuat pendekatan rekonsiliasi perlu disesuaikan secara kontekstual.

Proses mediasi warga Desa Jatilengger dilakukan melalui forum-forum diskusi tingkat dusun yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara terbuka tanpa rasa takut akan intimidasi (Suryandaru, 2016). Melalui komunikasi dialogis ini, terjadi pemahaman bersama dan negosiasi sosial yang membantu meredakan ketegangan politik pasca Pilkades.

Pendekatan ini juga diterapkan di Desa Tanah Merah, Kabupaten Indagiri Hilir, di mana dialog terbuka yang difasilitasi oleh tokoh adat dan tokoh agama setempat terbukti mampu memperkuat kohesi sosial dan menurunkan ketegangan antarwarga pasca konflik (Afrihadi et al., 2025). Forum-forum yang digunakan bersifat inklusif dan dilaksanakan di ruang komunitas, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat secara langsung, termasuk kelompok pemuda dan perempuan.

Strategi rekonsiliasi yang dilakukan di Desa Langga, Kabupaten Manggarai, pendekatannya cenderung lebih religius dan simbolik. Tokoh Gereja Katolik, khususnya pastor paroki, berperan sebagai fasilitator utama dalam mengadakan dialog terbuka yang berlangsung di lingkungan gereja yang dipandang sebagai ruang netral dan spiritual. Proses rekonsiliasi di sini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara sosial, tetapi juga melibatkan refleksi moral dan spiritual untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan (Sabo, 2025).

Dialog terbuka yang inklusif dan didukung oleh mediator terpercaya merupakan kunci utama dalam menyelesaikan ketegangan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan teori

komunikasi dialogis yang dicetuskan oleh Habermas bahwa komunikasi yang bebas dari dominasi memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dan konsensus sosial yang lebih kokoh (Aryanto & Sitorus, 2025). Dengan demikian, pengalaman di Desa Jatilengger dan berbagai wilayah lain menunjukkan bahwa forum diskusi terbuka yang inklusif, didukung oleh mediator yang memiliki legitimasi sosial, mampu menciptakan ruang dialog yang aman dan setara bagi seluruh warga. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat membangun kembali kepercayaan dan memperkuat kohesi sosial pasca konflik.

Penguatan jaringan sosial dan aktivitas komunal seperti kerja bakti dan kegiatan adat di Desa Jatilengger menjadi media efektif dalam mengikis jarak sosial yang terbentuk akibat polarisasi politik. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang interaksi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyembuhan sosial yang memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar warga (Adiputro et al., 2024). Hal ini juga terjadi di Desa Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang menunjukkan bahwa aktivitas komunal seperti musyawarah adat, kerja bakti, serta perayaan tradisional menjadi ruang sosial yang menyatukan kembali warga yang sempat terbelah akibat perbedaan pilihan politik. Proses ini secara perlahan membangun kembali kepercayaan antarwarga melalui kerja kolektif yang bersifat egaliter dan tidak memihak.

Aktivitas komunal menciptakan ruang interaksi informal yang menyatukan warga dari berbagai latar belakang politik dalam suasana kebersamaan yang netral dan konstruktif. Selain itu, kegiatan gotong royong yang dilakukan di ruang publik seperti perbaikan jalan desa, pembersihan lingkungan, dan pembangunan fasilitas umum menjadi simbol nyata bahwa kerja sama lintas kelompok masih mungkin

terwujud meskipun sebelumnya sempat terjadi konflik.

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Paropo, Kabupaten Dairi, di mana pelibatan kelompok pemuda dan perempuan dalam aktivitas sosial dan budaya menjadi katalis penting bagi rekonsiliasi sosial. Melalui kegiatan seperti lomba budaya lokal, pertunjukan musik tradisional, dan pelatihan kewirausahaan, terjadi proses re-integrasi sosial yang mempertemukan kembali warga dalam semangat kolaboratif. Inisiatif ini memperkuat jaringan sosial horizontal dan memperluas jangkauan solidaritas antarwarga, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas (Tambunan, 2024; Rahayu, 2022). Penguatan jaringan sosial ini selaras dengan pendekatan teori sosial Putnam (2000) tentang *social capital*, yang menekankan pentingnya jaringan kepercayaan, norma timbal balik, dan keterlibatan dalam aktivitas kolektif sebagai fondasi kohesi sosial. Dalam konteks Desa Jatilengger, partisipasi warga dalam aktivitas komunal telah menunjukkan bahwa pemulihan sosial tidak hanya ditentukan oleh intervensi formal, tetapi juga oleh inisiatif lokal yang berbasis pada relasi sosial dan kesadaran kolektif. Aktivitas komunal menjadi wahana rekonsiliasi yang bersifat non-verbal namun memiliki dampak signifikan dalam mempererat relasi sosial yang sempat retak akibat kontestasi politik.

Dengan demikian, strategi rekonsiliasi di Desa Jatilengger yang mengandalkan pendekatan informal, mediasi dialogis, serta penguatan jaringan sosial melalui aktivitas komunal telah menunjukkan efektivitas dalam meredam konflik dan membangun kembali kohesi sosial. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal serta struktur sosial yang telah lama terbentuk dalam komunitas. Keberhasilan strategi ini menegaskan bahwa rekonsiliasi pasca Pilkadaes

memerlukan pendekatan yang fleksibel, kontekstual, dan partisipatif, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyembuhan sosial.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatilengger

Proses rekonsiliasi pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Jatilengger tidak berlangsung secara spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memengaruhi. Di satu sisi, terdapat faktor-faktor pendukung yang mendorong terciptanya rekonsiliasi. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses rekonsiliasi. Nilai budaya lokal, tradisi, dan norma sosial memegang peranan penting dalam membentuk dan memfasilitasi proses rekonsiliasi di masyarakat (Hardiniawan et al., 2024). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan bersama yang mengatur perilaku sosial dan interaksi antarwarga, sehingga menciptakan kesepahaman dan harmoni dalam menghadapi konflik pasca Pilkades.

Di Desa Jatilengger, praktik gotong royong dan musyawarah untuk mufakat menjadi fondasi utama dalam proses penyembuhan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, seperti kerja bakti bersama, upacara adat, dan ritual-ritual sosial, menyediakan ruang dan momentum bagi warga untuk berkumpul, berdialog, dan membangun kembali rasa saling percaya yang sempat terpecah akibat polarisasi politik. Melalui tradisi ini, ketegangan dan konflik yang sebelumnya memecah belah masyarakat dapat diredakan karena tradisi tersebut menanamkan nilai solidaritas, toleransi, dan rasa kebersamaan yang kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Desa Bareng, Kabupaten

Banyuwangi, yang menegaskan pentingnya nilai kearifan lokal dan norma sosial dalam membangun rekonsiliasi pasca konflik serta keberhasilan rekonsiliasi yang sangat tergantung pada legitimasi sosial dan penghormatan terhadap tradisi lokal oleh masyarakat (Ikola, 2025). Secara keseluruhan, nilai budaya lokal, tradisi, dan norma sosial berkontribusi pada terciptanya mekanisme rekonsiliasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghormati elemen-elemen budaya tersebut, proses rekonsiliasi di desa ini tidak hanya sebatas penyelesaian konflik secara formal, melainkan menjadi proses pemulihan hubungan sosial yang mendalam, menyentuh akar budaya masyarakat, dan memperkuat kohesi sosial jangka panjang.

Sosok kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memegang peranan strategis dalam proses rekonsiliasi di masyarakat, khususnya pasca konflik politik seperti Pilkades. Kepala desa yang memiliki legitimasi formal dapat menginisiasi proses rekonsiliasi melalui kebijakan dan kegiatan yang mendorong dialog dan kerjasama antarwarga (Muzakkir, 2022). Tokoh adat dan tokoh agama, dengan legitimasi kultural dan moralnya, memegang peranan penting dalam membangun narasi perdamaian yang berlandaskan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama yang dianut masyarakat.

Sementara itu, tokoh pemuda sebagai representasi generasi penerus memiliki energi dan kreativitas untuk menggerakkan partisipasi aktif, khususnya dari kalangan muda, dalam proses rekonsiliasi. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat dan kepemimpinan lokal di Desa Jatilengger menjadi sangat krusial. Kepemimpinan yang inklusif, netral, dan berorientasi pada kepentingan bersama dapat mendorong proses rekonsiliasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dinamika politik lokal terutama yang berkaitan dengan kompetisi antar

calon kepala desa dan polarisasi kelompok pendukung, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses rekonsiliasi. Polarisasi ini sering kali diperkuat oleh kampanye yang menggunakan isu identitas, seperti agama, suku, dan ras, sebagai alat untuk meraih suara. Akibatnya, masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang saling berseberangan, yang dapat mengarah pada konflik horizontal dan merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat (Rahman, 2020). Situasi ini diperparah oleh ketegangan antara pendukung calon yang kalah dan yang menang, di mana rasa ketidakpuasan dan kekecewaan dapat berkembang menjadi kebencian dan prasangka.

Tak jarang, media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan narasi-narasi yang memperburuk polarisasi, dengan memperparah ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Dalam konteks Desa Jatilengger, polarisasi politik ini menyebabkan fragmentasi sosial yang mendalam, di mana interaksi antarwarga menjadi terbatas dan penuh kecurigaan. Hal ini menghambat upaya-upaya rekonsiliasi yang membutuhkan partisipasi aktif dan kepercayaan antar kelompok.

Tantangan dan hambatan praktis yang turut menghambat proses rekonsiliasi di Desa Jatilengger. Salah satunya adalah ketidakpercayaan antarwarga yang muncul akibat konflik sebelumnya. Ketidakpercayaan ini membuat warga enggan untuk terlibat dalam forum-forum dialog atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial (Sumarto, 2025). Trauma sosial yang dialami oleh masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Pengalaman konflik yang menyakitkan membuat sebagian warga memilih untuk menarik diri dari interaksi sosial, sehingga memperlambat proses rekonsiliasi. Selain itu, akses terbatas ke forum dialog dan kurangnya fasilitator yang netral dan terpercaya juga menjadi kendala dalam menciptakan ruang-

ruang diskusi yang inklusif dan produktif (Wardhanni, 2024). Dalam beberapa kasus, forum-forum yang ada justru didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari kelompok lain dan memperparah fragmentasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa forum-forum dialog yang dibentuk benar-benar inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, dinamika politik lokal dan tantangan praktis seperti ketidakpercayaan dan trauma sosial menjadi faktor-faktor utama yang menghambat proses rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger.

Dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor pendukung seperti nilai budaya lokal, tradisi, norma sosial, serta peran strategis tokoh masyarakat dan kepemimpinan lokal, dengan faktor penghambat berupa dinamika politik yang memicu polarisasi kelompok, ketidakpercayaan antarwarga, dan trauma sosial. Nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah untuk mufakat menjadi fondasi penting dalam membangun kembali hubungan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat, sementara tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan tokoh pemuda berperan sebagai motor penggerak rekonsiliasi. Namun, polarisasi politik yang melibatkan isu identitas dan penggunaan media sosial kerap memperdalam perpecahan, serta hambatan praktis seperti ketidakpercayaan dan kurangnya ruang dialog inklusif turut memperlambat proses penyembuhan sosial. Dengan demikian, rekonsiliasi di Desa Jatilengger bukan hanya soal penyelesaian konflik formal, melainkan pemulihan hubungan sosial yang menyentuh akar budaya dan memerlukan kepemimpinan yang inklusif serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

3.4. Dampak Politik Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatilengger

Rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger menunjukkan dinamika politik yang tidak sederhana tampaknya. Secara sosial, masyarakat memang kembali menunjukkan hubungan yang cair melalui kegiatan bersama seperti kerja bakti, pengajian, hingga peringatan hari kemerdekaan. Ruang-ruang sosial semacam ini menjadi medium netral dan inklusif yang secara efektif mempertemukan kelompok yang sebelumnya berseteru, sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa tradisi lokal dan partisipasi dalam forum sosial merupakan pilar utama stabilitas pasca kontestasi politik desa (Tumanggor & Azhar, 2025). Pendekatan sosial-kultural ini terbukti mampu meredakan konflik jangka pendek, namun rekonsiliasi yang hanya berbasis relasi sosial belum cukup tanpa restrukturisasi keadilan dan distribusi kuasa (Tidore, 2020). Stabilitas yang terbentuk masih berada pada level permukaan, belum menyentuh aspek politik yang lebih substantif.

Salah satu dampak yang mencolok adalah ketimpangan representasi dalam pemerintahan desa. Kelompok pendukung calon yang kalah mengaku tidak diundang dalam musyawarah desa, bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan. Hal ini senada dengan temuan yang menunjukkan bahwa kekalahan dalam Pilkades seringkali diikuti oleh praktik pembungkaman politik secara halus melalui pengabaian representasi. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap struktur desa dan memperlemah proses demokrasi lokal yang merupakan bentuk kegagalan dalam memenuhi prinsip *inclusiveness* dan *effective participation*.

Dampak lain yang muncul adalah eksklusif politik yang ditandai oleh rendahnya partisipasi sebagian warga.

Pendukung calon yang kalah tidak hanya pasif, tetapi juga secara aktif menghindari kegiatan desa dan forum sosial. Kondisi ini mencerminkan pola yang serupa dengan yang ditemukan di Lombok Timur, di mana ketidakterlibatan warga pasca Pilkades memperlemah legitimasi pemerintah dan memunculkan jarak antara warga dan penguasa desa (Farisi et al., 2025). Partisipasi politik yang rendah bukan sekadar masalah kehadiran fisik, tetapi juga bentuk dari terputusnya keterlibatan emosional dan aspiratif warga terhadap masa depan desa.

Ketiadaan kebijakan inklusif menjadi titik lemah dalam proses rekonsiliasi di Jatilengger. Tidak ada forum netral, surat edaran, ataupun inisiatif kebijakan yang dirancang pemerintah desa untuk memastikan keterlibatan semua pihak. Rekonsiliasi dibiarkan berjalan secara informal dan sosial, tanpa dukungan regulatif yang adil. Kondisi ini berbeda dari studi yang dilakukan di Kulon Progo, yang menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi pasca Pilkades membutuhkan peran aktif pemerintah desa dalam membentuk forum netral, kebijakan distribusi yang setara, dan jaminan akses terhadap program Pembangunan (Tanti, 2024). Tanpa restrukturisasi kebijakan, rekonsiliasi sosial hanya menghasilkan stabilitas semu yang rawan runtuh saat kontestasi berikutnya berlangsung.

Semua dinamika tersebut memberikan implikasi terhadap kohesi sosial dan tata kelola desa. Warga memang tampak hidup berdampingan secara formal, namun ketegangan emosional dan rasa ketidakadilan masih terasa di bawah permukaan. Pada penelitian lain menyebutkan bahwa jika oposisi tidak dilibatkan dalam struktur pemerintahan dan distribusi program tidak adil, maka tata kelola desa hanya akan berjalan parsial (Pantola et al., 2025). Pemerintah desa hanya akan didukung sebagian warga, sementara lainnya menjadi skeptis atau

pasif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun rekonsiliasi pasca Pilkades di Desa Jatilengger berhasil menjaga harmoni sosial, ia belum menyentuh dimensi politik secara menyeluruh. Pemerintah desa perlu mengambil langkah konkret untuk menyusun kebijakan yang inklusif, mendorong representasi yang adil, dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis agar kohesi sosial yang telah terbentuk dapat terus terjaga dan diperkuat secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa di Desa Jatilengger merupakan manifestasi dari ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dampak polarisasi politik lokal. Rekonsiliasi tidak dilakukan melalui pendekatan formal institusional, melainkan berkembang secara organik dari bawah melalui relasi sosial yang bersifat akrab dan berbasis nilai-nilai budaya lokal. Musyawarah, kerja bakti, pengajian, serta peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan menjadi ruang-ruang sosial yang efektif untuk mempertemukan kembali warga yang sempat berseberangan secara politik. Keberhasilan proses ini didukung oleh peran sentral tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, serta nilai-nilai gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Namun demikian, proses rekonsiliasi ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Masih terdapat sisa luka emosional, rasa saling curiga, dan fanatisme politik yang tersisa, yang menghambat terjadinya penyatuan sosial yang sepenuhnya utuh. Selain itu, dampak politik dari kontestasi masih terlihat dalam bentuk ketimpangan partisipasi dan eksklusi sosial terhadap kelompok yang kalah, yang menunjukkan bahwa harmonisasi sosial belum sepenuhnya sejalan dengan keadilan politik. Dengan kata lain, rekonsiliasi di

Desa Jatilengger telah berhasil memulihkan dimensi sosial masyarakat secara relatif, namun belum menyentuh transformasi politik yang lebih adil dan inklusif.

Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkades di tingkat desa tidak dapat dipahami sekadar sebagai peredam konflik, melainkan sebagai proses sosial yang berkelanjutan dan kompleks. Rekonsiliasi harus dimaknai sebagai proses membangun kembali jejaring sosial melalui mekanisme budaya lokal yang reflektif, partisipatif, dan konsisten. Keberlanjutan rekonsiliasi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat terhadap perbedaan, dukungan institusional pemerintah desa, serta adanya ruang dialog yang inklusif lintas kelompok politik dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari berbagai pihak untuk memperkuat proses ini. Pemerintah desa perlu menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan seluruh warga, tanpa memandang latar belakang politik, untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan bersama. Tokoh masyarakat, pemuka agama, serta perangkat desa perlu terus menjalankan perannya sebagai penjaga harmoni sosial, bukan hanya saat konflik muncul, tetapi secara berkelanjutan melalui kegiatan sosial dan budaya yang menyatukan. Sementara itu, masyarakat sendiri harus didorong untuk menginternalisasi nilai toleransi dan inklusivitas sebagai fondasi hidup bersama dalam bingkai desa yang demokratis.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dan partisipatif dalam memahami dinamika rekonsiliasi politik di tingkat lokal. Studi-studi selanjutnya diharapkan dapat memperluas perspektif ini dengan menjangkau wilayah lain, mengeksplorasi peran lembaga non-formal, serta mendalami hubungan antara rekonsiliasi sosial dan transformasi politik secara lebih komprehensif. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap rekonsiliasi desa

akan menjadi lebih utuh, kontekstual, dan dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi akar rumput yang berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputro, B., Marchira, C. R., & Waluya, S. D. (2024). Amamangun Karyenak Tyasing Sasama: Fungsi Slametan Dalam Mendukung Kesehatan Mental Komunitas Melalui Perspektif Pemberdayaan Dan Partisipasi Sosial Pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 2(2), 270–278.
- Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 206–219.
- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Annasta Surya, M. B. (2024). *RESOLUSI KONFLIK POLITIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 2023 (DESA KARANG LANGIT KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR)*. IPDN Jatinangor.
- Aryanto, T. N., & Sitorus, F. K. (2025). KAJIAN TEORI KOMUNIKASI JÜRGEN HABERMAS: FONDASI RASIONALITAS DALAM INTERAKSI SOSIAL. *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 6(2), 370–382.
- Auliyah, R., & Aziz, I. N. (2025). Dari Mimbar Ke Masyarakat: Peran Tokoh Agama Desa Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2427–2433.
- Chalid, I. (2024). *Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial*. Deepublish.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302.
- Hardiniawan, Y. P., Kartono, D. T., & Zuber, A. (2024). Konflik Sosial Kelompok Semu Yang Terjadi Di Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Empiris Di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro). *Interdisciplinary And Multidisciplinary Studies: Conference Series*, 2(2), 73–79.
- HIDAYAT, F. (2024). *KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Hidayatullah, D. F., & Pitono, A. (2024). *STRATEGI PENANGANAN POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PANCURAN GADING, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Hutajulu, H. M. R., Putri, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 38–49.
- IKOLA, B. (2025). *Restorative Justice: Studi Regulasi Dan Kewenangan*

- Polres Tanah Datar.*
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Kusuma, A. J. (2022). Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan Dalam Konstruksi Sosial Budaya. *Journal Of Political Issues*, 4(1), 50–61.
- Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). *Evaluation Of Restorative Justice Implementation In Criminal Conflict Resolution: Victim And Offender Perspectives.*
- Januraga, P. P., & Ked, S. (2024). *Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.* Baswara Press.
- Khobir, A., & Khasanah, N. (2020). *Potret Diskriminasi Pendidikan: Gerakan Sosial Baru Dan Perlawanan Agama Lokal "Agama Djawa Soenda."* Penerbit NEM.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.
- Lubis, D. M., Permana, D., & Nuradhwati, R. (2024). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS WILAYAH (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG). *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Muzakkir, M. A. (2022). *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.* UIN Mataram.
- Oktapiani, A., Agatha, R. O., Luthfia, S., & Witianti, S. (2024). Dinamika Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(3), 8189–8196.
- Onan, Y. C. G., Djaha, A. S. A., & Andayana, M. N. D. (2025). HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA OJANDETUN KABUPATEN FLORES TIMUR). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3(1), 16–26.
- Pantola, B. R. S., Ola, U., & Boro, V. I. A. (2025). Dominasi Supradesa Dalam Pembangunan Desa: Implementasi Asas Subsidiaritas Di Desa Oelnunuh. *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 243–259.
- Putra, Y. H., Diva, S. H., & Diana, P. (2022). *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal.* Uwais Inspirasi Indonesia.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80.
- Rahadiyanti, W. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021).* Universitas Nasional.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial.* Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramadhan, M. F. S. (2022). *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim, Dan Kemunduran Demokrasi.* Universitas Brawijaya Press.
- Rohana, R., & Ahmad, R. (2025). Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Di Pulau Sumbawa. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 7–11.
- Sabo, M. (2025). *Tradisi Ma'patondokan Sebagai Model Rekonsiliasi Di Lembang Poton Kecamatan Bonggakaradeng.* Institut Agama

- Kristen Negeri Toraja.
- Silvia, L. (2024). *KOLABORASI MODAL POLITIK PEMERINTAH KALURAHAN DAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryandaru, Y. S. (2016). Perempuan Sebagai Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Di Kota Mojokerto). *Indonsea Yang Berkeadilan Sosialtanpa Diskriminasi*, 713–733.
- Syarif, M. U. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi Community Living Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*. Lintas Nalar.
- Tanti, H. D. M. S. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Taufiq, T. (2025). *MODAL SOSIAL DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2021 DI DESA CEMBA, KABUPATEN ENREKANG, SULAWESI SELATAN*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Tidore, B. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon 1999-2002*.
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 10(1), 92–120.
- Trindasari, L. (2025). KONFLIK DI PEDESAAN AKIBAT PILKADA 2024. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(1).
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*. Cv. Azka Pustaka.
- Tumanggor, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1417–1426.
- Utami, G. N. (2023). *KONFLIK POLITIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 2021 DI DESA MASGO KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI*. IPDN.
- Wardhanni, R. (2024). *Penerapan Kebijakan Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wasi, I. (2024). *Konsolidasi Demokrasi: Sebuah Telaah Politik Pasca-Reformasi Dari Politik Lokal Hingga Nasional*. Deepublish.